**Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Era Digital melalui Implementasi E-Government dan Good Governance untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

**Oleh :**

Adelia Anggraini (2416041124)

Reguler D



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**LAMPUNG**

**2025**

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pergeseran paradigma administrasi publik di era digital. Menurut Alamsyah et al. (2025), metode kualitatif memungkinkan peneliti menelaah dinamika sosial dan organisasi yang kompleks, terutama dalam proses adaptasi birokrasi terhadap digitalisasi. Pendekatan ini juga membantu mengungkap makna di balik perilaku, persepsi, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Tipe penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris sekaligus menganalisis hubungan antara *e-government* dan *good governance* dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik. Gultom et al. (2024) menegaskan bahwa analisis deskriptif penting untuk menilai sejauh mana penerapan teknologi digital mampu memperbaiki efisiensi dan transparansi birokrasi. Pendekatan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan digitalisasi, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, maupun kesiapan masyarakat.

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga eksploratif karena berusaha memahami hubungan sosial dan kepercayaan publik yang muncul dari proses digitalisasi layanan pemerintahan. Khairudin et al. (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan *e-government* sangat dipengaruhi oleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya mengkaji dimensi sosial-politik dari digital governance agar transformasi birokrasi tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tipe penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana integrasi *e-government* dan *good governance* mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs). Natalia (2022) menyoroti bahwa tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel merupakan prasyarat utama bagi pemerintahan digital yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif-analitis memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai sejauh mana birokrasi Indonesia mampu bertransformasi menuju pemerintahan yang modern, efektif, dan berkelanjutan.

* 1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini diarahkan pada pergeseran paradigma administrasi publik di era digital melalui implementasi *e-government* dan penerapan prinsip *good governance* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan tinjauan pustaka dan rumusan masalah pada Bab I dan Bab II, fokus penelitian dibagi ke dalam tiga aspek utama berikut:

1. **Transformasi Paradigma Administrasi Publik di Era Digital**  
   Penelitian menyoroti bagaimana digitalisasi mengubah pola kerja birokrasi dari sistem hierarkis menuju sistem yang kolaboratif, adaptif, dan partisipatif (Supriyadi, 2021). Fokus ini mencakup pemahaman atas dinamika perubahan struktur dan budaya organisasi pemerintah sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dan efisiensi publik di era digital (Alamsyah et al., 2025).
2. **Implementasi *E-Government* dan Efektivitas Pelayanan Publik**  
   Fokus kedua diarahkan pada analisis implementasi *e-government* dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi layanan publik. Penelitian menelusuri sejauh mana sistem digital seperti SPBE dan OSS dapat memperbaiki kualitas pelayanan, mempercepat akses masyarakat, dan mengurangi biaya operasional (Gultom et al., 2024). Selain itu, penelitian juga menilai tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan digital antarwilayah dan rendahnya literasi digital masyarakat.
3. **Integrasi *Good Governance* dan Pembangunan Berkelanjutan**  
   Fokus ketiga membahas penerapan prinsip *good governance*, terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai landasan etis dalam birokrasi digital. Penelitian mengeksplorasi bagaimana sinergi antara *e-government* dan *good governance* dapat membangun kepercayaan publik (Khairudin et al., 2022) serta berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Natalia, 2022). Selain itu, penelitian juga memperhatikan isu etika digital dan perlindungan data pribadi sebagai bagian penting dari tata kelola digital yang baik (Hardjati, 2023).

Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis penerapan *e-government*, tetapi juga pada dimensi sosial, etika, dan tata kelola publik yang membentuk birokrasi digital berkelanjutan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan interaksi para aktor birokrasi serta masyarakat dalam proses transformasi administrasi publik di era digital Indonesia.

* 1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di **Pemerintah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung**, sebagai salah satu daerah yang sedang gencar mengimplementasikan kebijakan digitalisasi birokrasi melalui program *Smart City* dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dengan fokus penelitian, yaitu pergeseran paradigma administrasi publik melalui integrasi *e-government* dan prinsip *good governance* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kota Bandar Lampung memiliki karakteristik birokrasi yang dinamis dan menjadi pusat aktivitas pemerintahan di Provinsi Lampung, sehingga representatif untuk mengkaji fenomena transformasi digital dalam administrasi publik. Implementasi layanan digital seperti *e-budgeting*, *e-planning*, dan layanan kependudukan daring menunjukkan upaya konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan adanya kesenjangan digital antarwilayah di Lampung yang mencerminkan tantangan nasional dalam pemerataan akses teknologi. Menurut Gultom et al. (2024), efektivitas *e-government* sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali secara mendalam dinamika sosial dan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai contoh konkret pelaksanaan *e-government* di tingkat lokal.

Dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung interaksi antara aparatur pemerintah dan masyarakat pengguna layanan digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Alamsyah et al. (2025) bahwa transformasi administrasi publik di era digital bukan hanya proses teknis, tetapi juga perubahan budaya organisasi dan pola komunikasi birokrasi. Di sisi lain, Khairudin et al. (2022) menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik dalam birokrasi digital agar inovasi berbasis teknologi dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandar Lampung dipilih karena memiliki konteks kebijakan, kesiapan teknologi, dan tantangan implementasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami bagaimana integrasi *e-government* dan *good governance* dapat mewujudkan administrasi publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

* 1. **Jenis dan Sumber data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan mendalam, berfokus pada pemahaman fenomena pergeseran paradigma administrasi publik di era digital melalui implementasi *e-government* dan prinsip *good governance* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

**3.4.1 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Data primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Informan mencakup aparatur pemerintah, pengelola layanan digital, serta masyarakat pengguna layanan publik berbasis *e-government*. Data ini digunakan untuk memahami persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi administrasi publik (Gultom et al., 2024).
2. **Data sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen kebijakan, laporan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), publikasi resmi pemerintah, serta hasil penelitian dan literatur akademik terkait administrasi publik digital dan *good governance* (Khairudin et al., 2022; Hardjati, 2023).

**3.4.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

* **Sumber primer** diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap aparatur pemerintah dan masyarakat pengguna layanan digital. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas, efisiensi, serta partisipasi publik dalam penerapan *e-government* (Alamsyah et al., 2025).
* **Sumber sekunder** berasal dari dokumen resmi, laporan instansi pemerintah, buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang relevan. Misalnya, jurnal oleh Gultom et al. (2024) yang menyoroti efektivitas *e-government* serta Natalia (2022) yang membahas kontribusi *good governance* terhadap pembangunan berkelanjutan.

Data sekunder ini juga mencakup kajian teoritis seperti yang dijelaskan oleh Supriyadi (2021) mengenai pergeseran paradigma administrasi publik dari model tradisional menuju birokrasi digital yang lebih partisipatif dan inklusif. Selain itu, buku oleh Khairudin et al. (2022) dan Hardjati (2023) dijadikan rujukan dalam memahami aspek kepercayaan publik, etika digital, serta tantangan tata kelola di era transformasi digital.

Dengan kombinasi antara data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, menggambarkan kondisi nyata birokrasi digital di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mewujudkan administrasi publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pergeseran paradigma administrasi publik di era digital melalui integrasi *e-government* dan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode untuk memperoleh data yang kaya, komprehensif, dan kontekstual.

**1. Wawancara mendalam**  
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada aparatur pemerintah, pengelola layanan digital, dan masyarakat pengguna layanan publik. Tujuannya untuk menggali persepsi, pengalaman, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi *e-government*. Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap makna subjektif dan pandangan partisipan terhadap perubahan birokrasi digital (Gultom et al., 2024).

**2. Observasi partisipatif**  
Observasi dilakukan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem *e-government*, seperti SPBE atau layanan administrasi daring. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat memahami secara langsung interaksi antara birokrasi dan masyarakat serta proses pelayanan digital. Observasi ini membantu memvalidasi data hasil wawancara dan memberikan gambaran nyata mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam birokrasi digital (Alamsyah et al., 2025).

**3. Studi dokumentasi**  
Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui analisis kebijakan, peraturan, laporan SPBE, OSS, dan dokumen resmi lain yang relevan. Data ini penting untuk menilai kesesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. Dokumen yang dianalisis juga mencakup publikasi ilmiah dan laporan pemerintah terkait penerapan *e-government* dan *good governance* (Khairudin et al., 2022).

**4. Triangulasi data**  
Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan dan dikonfirmasi satu sama lain agar hasil penelitian lebih valid dan reliabel (Hardjati, 2023). Triangulasi juga membantu menekan bias peneliti serta memastikan bahwa interpretasi data mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Dengan kombinasi keempat teknik ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dinamika transformasi birokrasi digital di Indonesia. Selain itu, data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara digitalisasi administrasi publik, penerapan prinsip *good governance*, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan (Natalia, 2022; Supriyadi, 2021).

* 1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis tematik. Tujuan utamanya adalah menafsirkan makna di balik fenomena pergeseran paradigma administrasi publik di era digital melalui integrasi *e-government* dan prinsip *good governance* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif dianalisis secara sistematis melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan mengelompokkan data berdasarkan kategori tematik yang relevan dengan fokus penelitian, seperti efisiensi layanan publik, akuntabilitas birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik. Gultom et al. (2024) menegaskan bahwa analisis terhadap penerapan *e-government* perlu mempertimbangkan dimensi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, proses reduksi dilakukan untuk menyeleksi data yang paling berkaitan dengan peningkatan kinerja administrasi publik digital.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif dan tabel kategorisasi agar hubungan antarvariabel dapat dipahami secara komprehensif. Natalia (2022) menjelaskan bahwa pendekatan tematik mempermudah identifikasi pola dan keterkaitan antara penerapan *good governance* dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam tahap ini, hasil wawancara dan dokumen kebijakan dianalisis untuk melihat bagaimana prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diterapkan dalam sistem birokrasi digital di Indonesia.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan berdasarkan teori dan literatur yang telah digunakan, seperti teori pergeseran paradigma administrasi publik dari Supriyadi (2021) dan konsep digitalisasi birokrasi menurut Alamsyah et al. (2025). Kesimpulan yang dihasilkan bersifat interpretatif dan menjawab rumusan masalah mengenai sinergi antara *e-government* dan *good governance* dalam menciptakan administrasi publik yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Hardjati (2023) menyatakan bahwa triangulasi penting dalam penelitian sosial untuk menghindari bias peneliti dan meningkatkan validitas temuan. Selain itu, dilakukan juga *member checking* kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi hasil penelitian dengan realitas di lapangan (Khairudin et al., 2022).

Dengan tahapan tersebut, analisis data dalam penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara mendalam dinamika digitalisasi administrasi publik di Indonesia serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang membentuk praktik administrasi publik digital secara menyeluruh.

* 1. **Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya, kredibel, dan menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Menurut Hardjati (2023), keabsahan data harus dijaga melalui proses verifikasi yang sistematis agar hasil penelitian memiliki validitas tinggi dan tidak bias terhadap persepsi peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk menjamin keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking*.

* **Triangulasi Sumber**  
  Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi seperti aparatur birokrasi, pejabat pengelola e-government, dan masyarakat pengguna layanan digital. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi temuan serta memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang efektivitas implementasi e-government dan penerapan *good governance* di Indonesia (Khairudin et al., 2022).
* **Triangulasi Metode**  
  Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Pendekatan ini bertujuan memperkuat kredibilitas hasil penelitian dengan cara saling melengkapi antara data empiris dan dokumen kebijakan. Gultom et al. (2024) menekankan bahwa penggunaan metode ganda dalam penelitian kualitatif membantu mengungkap realitas sosial birokrasi digital secara komprehensif, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan aspek teknis tetapi juga dimensi sosial dan kelembagaan.
* **Member Checking**  
  *Member checking* dilakukan dengan cara meminta responden untuk meninjau kembali hasil interpretasi peneliti atas data yang diperoleh. Teknik ini berfungsi untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar mencerminkan pandangan dan pengalaman responden (Alamsyah et al., 2025). Proses ini juga memperkuat kepercayaan antara peneliti dan partisipan, sehingga data yang dihasilkan lebih valid dan akurat.

Selain tiga teknik utama tersebut, penelitian ini juga menerapkan prinsip *dependability* dan *confirmability* untuk menjaga konsistensi hasil. *Dependability* dicapai melalui dokumentasi proses penelitian yang sistematis, sedangkan *confirmability* dijaga dengan memastikan bahwa interpretasi data didasarkan pada bukti empiris, bukan asumsi peneliti (Natalia, 2022). Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini terjamin secara metodologis sesuai dengan prinsip ilmiah penelitian kualitatif dalam administrasi publik digital.

**Daftar Pustaka:**

Alamsyah, K., Ariesmansyah, A., & Arifin, R. K. (2025). *Administrasi publik di era digitalisasi*. Mega Press Nusantara.

Gultom, D. N., Khairina, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas e-government dalam administrasi publik. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10*(1), 128–136.

Hardjati, S. (Ed.). (2023). *Governance di era digital: Isu-isu kontemporer* (Edisi ke-2). UPN "Veteran" Jawa Timur.

Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah. (2022). *Membangun kepercayaan publik di Indonesia: Peran good governance dan e-government*. CV. Amerta Media.

Natalia, A. (2022). Paradigma good governance dalam administrasi publik memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam, 18*(1), 15–26.

Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran dalam paradigma ilmu administrasi publik. *Jurnal Rasi, 3*(1).